

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian kegiatan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di Kabupaten Melawi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan dengan cara melakukan pengawasan terhadap aktifitas perusahaan, pelaksanaan izin lingkungan, melakukan sosialisasi kepada semua perusahaan perkebunan yang dekat dengan daerah rawan kebakaran, mewajibkan perusahaan untuk melengkapi sarana dan prasarana antisipasi karhutla, melakukan pengecekan lapangan, memberikan sanksi yang tegas, dan serta Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait melakukan sosialisasi tentang Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat tradisional di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi. Pengendalian Kebakaran hutan di Kabupaten Melawi belum berjalan efektif, dikarenakan ada beberapa kendala.
2. Belum optimalnya Pengendalian Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di Kabupaten Melawi diakibatkan adanya kendala berupa kekurangan anggaran yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam setiap kegiatan usaha pencapaian yang target kinerja yang telah direncanakan. dan kurangnya personil PPLH dimana tugas dan

fungsinya sangat banyak sehingga membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi perlu lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian, dan pencemaran lingkungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diharapkan konsisten dalam pengawasan dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pembukaan lahan tanpa dibakar dan bahaya tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar.
2. Dinas Perkebunan perlu memberikan sosialisasi atau pengarahan ke masyarakat di Kabupaten Melawi tentang bahaya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan apabila dilakukan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia, Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2006, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Maruli Pardemean, 2011, *Sukses Membuka Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Depok.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Putra Agustia, 2013, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollutio*”, Universitas Riau Pekanbaru, Riau.
- Raymond Dart Pakpahan, 2018 , *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, Bentang Pustaka, Jakarta.
- Saharjo, B.H., 2003, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan Departemen Silvikultur*, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schweithelm, 1999, *Penyebab dan Dampak Kebakaran. Dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunarko, 2014, *Budi Daya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan*, AgroMedia Pustaka, Jakarta.

JURNAL

- Ayu Nurul alifa, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional, *jurnal skripsi*, volume 5 nomor 3 Tahun 2016, Universitas Diponegoro.
- Erwin susanto, 2010, ”profil Kabupaten Melawi” *jurnal skripsi*, 15 oktober 2010, Universitas Tanjungpura.

Indra Januar Siregar, "Penanggulangan Kebakaran Hutan", Universitas Indonesia, Depok.

Sahat M.Pasaribu dan Supena Friyatno, 2008, "Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya, *jurnal skripsi*, 11 februari 2008, Universitas Padjadjaran.

Tuhulele Popi, 2014, "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Yustisia*, Vol.3 Nomor2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4453. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1180.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 583.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 125.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi

Yang Dapat Dikonversi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1676.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sudah Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2019 Nomor 64. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi. Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2008 Nomor 61. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.

Internet

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2019/KEBAKARAN_HUTAN_DAN_DAMPAKNYA_BAGI_KEHIDUPAN, diakses 3 Desember 2021

<https://kbbi.web.id/Dinas>, diakses pada 23 November 2021

<https://ppid.melawikab.go.id/statis-26-profil-daerah.html>, diakses 3 September 2021

Karhutla monitoring sistem, rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021, hlm.1, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, 7 september 2021

Latifah, Pengertian Lahan Dan Pengelolaan Lahan, hlm 2, <https://budidayatanaman-perkebunan.com>, diakses pada 28 Mei 2022, pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0163/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi
Jl. Juang Km I. No. 157 Nanga Pinoh
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Louis Tryadi
2. Nomor Mahasiswa : 180513203
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Kabupaten Melawi

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mirican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1 : Surat Keterangan Izin Melakukan Riset Di Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Juang KM.1 No.157
NANGA PINOH

Kode Pos. 79672

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 525 ~~244~~ / Dispanbun / 2022

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Afandi, SP,MM
NIP : 19730314 200502 1 003
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Melawi

Dengan ini menerangkan :

Nama : Louis Tryadi
NIM : 180513203
Prodi : S1 Hukum
Alamat : Jl. Mrican Baru No.28, Depok,Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian Peran Dinas Pangan dan Perkebunan Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan di Kabupaten Melawi Pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Melawi Pada Tanggal 06 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Dinas Pangan Dan Perkebunan
Kabupaten Melawi
Kepala Bidang Perkebunan


YUSUF AFANDI, SP., MM.
Pembina / IV.a
NIP=19730314 200502 1 003

Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melakukan riset di Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi



Lampiran 3 : Dokumentasi bersama Bapak Yusuf Afandi, S.P., M.M. Selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan di Kabupaten Melawi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0162/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
Jl.Kota Baru Km.3, Nangah Pinoh, Kalimantan Barat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Louis Tryadi
2. Nomor Mahasiswa : 180513203
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Kabupaten Melawi

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,

Df. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 4 : Surat Izin Riset Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Gelora Juang Kompleks Stadion MTQ
NANGA PINOH

KodePos.79672

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800 / 119 / DLH / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Jatnika, S.H.
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/III d
NIP : 19781215 200604 1 007
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Pengawasan dan Penegakan
Hukum Lingkungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Louis Tryadi
NIM : 180513203
Prodi : S1 Hukum
Alamat : Jl. Mrican Baru No.28, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Kabuptaen Melawi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi pada tanggal 06 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Melawi, 06 Juni 2022

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Melawi
Pengawas Lingkungan Hidup /
Sub Koordinator Pengawasan dan
Penegakan Hukum Lingkungan



DENI JATNIKA, S.H.
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19781215 200604 1 007

Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Riset Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi



Lampiran 6 : Dokumentasi Bersama Bapak Deni Jatnika, S.H. Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.



Lampiran 7 :Dokumentasi Kebakaran Lahan Di perkebunan Masyarakat



Lampiran 8: Dokumentasi Kebakaran Lahan Di Perusahaan Rafi Kamajaya Abadi

